

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)
- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Azam, Monirul, *The Experiences of TRIPS-compliant Patent Law Reform in Brazil, China, India, and South Africa-Lessons for Bangladesh Intellectual Property and Public Health in the Developing World*, Open Book Publishers: Cambridge, 2016
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia, "Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Khor, Martin, *Compulsory License and "Government Use" to Promote Access to Medicines: Some Examples*, (Malaysia: Third World Network, 2014)
- Margono, Suyud, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 1989)
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Parlindungan, A.P., *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Ramli, Ahmad, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Dirjen HKI, 2013)
- Roisah, Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Samsudin, Dadan, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2016)
- Santoso, Budi, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Suptranto, Johanes, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement World Establishing the World Trade Organization*)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral;

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1237/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk untuk atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Obat Anti Retroviral

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/SK/X/2004 tentang Pemberian Gratis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Obat Anti Retroviral (ARV) untuk HIV/AIDS

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2004 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan PPN Tidak Dipungut atas Impor Bahan Baku Obat Anti Retroviral

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.010/2005 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan PPN Tidak Dipungut atas Impor Bahan Baku dan Obat Jadi Anti Retroviral

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 109/MENKES/SK/III/2013 tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk untuk dan atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Obat Antiviral dan Antiretroviral

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 312/MENKES/SK/1X/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral;

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS)

Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health

Thailand Patent Act B.E 2522 (1979) as Amended by the Patent Act (No.2) B.E 2535 (1992) and the Patent Act (No.3) B.E 2542 (1999)

Malaysia Patent Act 291 of 1983 as amended by Act A1264 of 2006

Brazil Patent Law No.9, 279

1. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Ahmad Arif Hidayat, Nyoman Serikat PJ, Sukinta “*Kepentingan Umum sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Pidana*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 06, Nomor 2, 2017
- Alif Muhammad Ardani, “*Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya*”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019
- Chandra Muliawan, “*Pemberian Paten Obat-Obatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Kesehatan di Indonesia terhadap Kesehatan di Indonesia*”, *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor 2, 2019
- Departemen Kesehatan R.I., “*Kebijakan Obat Nasional*”, (Jakarta, Departemen Kesehatan RI, 2006)
- Department of Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicine of WHO and the Bureau for Development Policy of the United Nations Development Programme, “*Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent*”, WHO and UNDP, 2005
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “*Pemeliharaan Paten*”, (Jakarta: 2020)
- Hanim Mafulah, “*Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha*”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 2, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2020
- I. G. A Yulia Purnamasari, “*Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Produk M2 Fashion Online di Singaraja Tahun 2015*”, *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2 No. 1, 2015
- Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku Hepatitis*, (Jakarta, Kementerian Kesehatan RI, 2020)
- Keziah Christi Angie, “*Pedoman Penentuan Persamaan pada Pokoknya oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019)
- Mas Rahmah, Nurul Bazirah, Edo Fajar Satria, “*Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Government Use) untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat HIV/AIDS*”, (Laporan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012)
- Mayas Mutias Sari dan Tatty Aryani Ramli, “*Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral Ditinjau dari Undang-Undang*

- Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Deklarasi Doha*”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, 2015
- Muhammad Ali Masnun dan Dina Roszana, “*Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 1, 2019
- Muhammad Muslim, “*Kerjasama BNPT dan Terrorism Prevention Branch (TPB) UNODC dalam Implementasi The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Pemerintah India dalam Melegitimasi Produksi ARV Generik Global*”, Journal of International Relations, Vol. 4, No. 2, 2018
- Novianti, “*Pelindungan Paten melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations Under the Patent Cooperation Treaty*”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Jakarta: 30 November 2017)
- Preisy Claudia Justitia Mokoagouw, “*Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*”, Lex Et Societatis, Vol. VII No. 1, 2019
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, “*Situasi dan Analisis HIV AIDS*”, (Jakarta, Kementerian Kesehatan RI, 2014)
- Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan R.I., “*Situasi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1987-2006*”, (Jakarta, Departemen Kesehatan RI, 2006)
- Putri Amalia, “*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Merek Dagang yang Belum Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1594 K/Pid.Sus/2012)*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019)
- Rivai, M. Muchtar, “*Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis*”, Jurnal Liquidity. 1 (2), 2012
- Russel Boltwood, “*Basic Patent Law in Brazil and Recent Developments*”, International In-house Counsel Journal, Vol. I, No.2, 2008
- Sartika Nanda Lestari, “*Implementasi Compulsory Licensing terhadap Obat-Obatan dalam Bidang Farmasi di Indonesia (Studi Berdasarkan DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)*”, (Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012)
- Samariadi, “*Pelaksanaan Compulsory Licensing Paten Obat-Obatan Bidang Farmasi di Indonesia Dikaitkan dengan DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*”, De Laga Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 2, 2016
- Sutarman Yodo, “*Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)*”, FIAT JUSTISIA Vol.10 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2016
- Suwit Wibulpolprasert, Vichal Chokevivat, Cecilia Oh, dan Inthira Yamabhai, “*Government Use Licenses in Thailand: The Power of Evidence, Civil Movement and Political Leadership*”, Globalization and Health, Vol. 7, No. 32, 2011

- Syafrida, “*Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia guna Meningkatkan Investasi Asing*”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 10 No.1, 2019
- Tomi Suryo Utomo, “*Implementasi Lisensi Wajib terhadap Produk Obat yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha*”, Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM, 2009
- Tony Hanoraga, Niken Prasetyawati “*Lisensi Wajib Paten sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten*”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 08, Nomor 2, 2015
- Umni Wasilah, Siti Rohimah, Mukhamad Su’udi, “*Perkembangan Bioteknologi di Indonesia*”, Jurnal Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
- Winner Sitorus, “*Kepentingan Umum dalam Pelindungan Paten*”, Jurnal Yuridika, Vol. 29, No. 1, 2014

2. Website

<https://dgip.go.id>
<http://www.hki.co.id/paten.html>
<https://www.who.int/ihr/procedures/pheic/en/>
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e